



Danais di 160 Kalurahan Sudah Cair

JOGJA—Sebanyak 160 kalurahan di DIY telah mencairkan Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19. Namun masih ada 97 kalurahan dan kelurahan di DIY lambat mengajukan proposal pencairan.

Ujang Hasanudin, Jumali,
& Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan 295 kalurahan dan kelurahan sudah siap berkasnya sehingga tinggal menunggu surat pemberitahuan pencairan anggaran.

“Yang sudah mencairkan



160 kalurahan,” kata Noviar, saat dihubungi Kamis (26/8).

Noviar mengatakan pemerintah kalurahan yang belum mengajukan proposal pencairan danais karena belum mengubah penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APB-Kal). Masih ada yang beranggapan pengajuan harus melakukan perubahan APB-Kal.

Padahal yang diminta hanya perubahan penjabaran APB-Kal sehingga cukup tanda tangan lurah atau tidak perlu menunggu persetujuan Badan

► Kalurahan yang belum mengajukan proposal pencairan Danais karena belum mengubah penjabaran APB-Kal.

► Saat ini kalurahan yang sudah mencairkan, mulai menggunakan Danais sesuai dengan proposal yang diajukan.

Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).

Menurut Noviar ada juga kalurahan yang beranggapan perlu mengubah APB-Kal karena sumber dana penanganan Covid-19 juga ada dari kabupaten dengan alasan agar tidak bolak balik mengubah APB-Kal.

► Halaman 11

Danais di...

"Kami minta semua kalurahan segera memproses tanpa harus menunggu perubahan APB-Kal karena Danais untuk penanganan Covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat," kata Noviar.

Saat ini kalurahan yang sudah mencairkan sudah mulai menggunakan dananya sesuai dengan proposal yang diajukan. Noviar menjelaskan bantuan danais kepada kalurahan dengan format Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tersebut diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di masing-masing kalurahan misalnya bantuan sembako bagi warga yang isolasi mandiri, operasional Satgas Covid-19 tingkat kalurahan, sarana dan prasarana penunjang, operasional selter, dan pemulasaraan jenazah Covid-19.

Besaran bantuan bukan berdasarkan keluasan wilayah atau jumlah penduduk melainkan jumlah RT yang masuk zona merah dan jumlah warga yang menjalani isolasi mandiri, dan juga ada tidaknya kelompok Jaga warga di setiap pedukuhan.

Besaran Danais untuk Kalurahan dan kalurahan yang tidak memiliki Jaga Warga Rp50 juta, sedangkan kalurahan/kalurahan yang sudah ada Jaga Warga minimal 50% tiap pedukuhan mendapat alokasi Rp75 juta, bagi yang masih ada RT zona merah sejak 24 Juli akan ada tambahan Rp5 juta untuk setiap RT zona merah.

Pencairan Berbeda

Noviar menyatakan tidak hanya kalurahan yang memperoleh danais, tetapi juga kalurahan di Kota Jogja. Namun mekanisme pencairannya berbeda. Jika di kalurahan melalui BKK, di kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) karena kalurahan di kota tidak memiliki APBDkal. Kelurahan di Kota Jogja menjadi bagian dari OPD Pemkot.

Ia berharap bantuan segera dibelanjakan. Nantinya setelah semua kalurahan dan kalurahan mencairkan danais akan dilakukan pengawasan dari Satpol PP, Paniradya Keistimewaan, Biro Pemerintah, dan Inspektorat. "Kami akan mengecek apakah sudah sesuai dengan yang diajukan dan surat pertanggungjawabannya sudah tepat belum," ujar Noviar.

Lurah Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Jogja, Darsana, mengatakan kelurahannya mendapat alokasi danais untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp75 juta lewat BTT dan sudah mulai dibelanjakan.

"Dananya untuk pengadaan paket sembako bagi warga terdampak pandemi Covid-19, edukasi pencegahan dan penanganan Covid-19, penguatan pelaksanaan PPKM, pengadaan

sarpras pendukung pencegahan dan penanganan Covid-19, penguatan Tim Kubur Cepat Covid [TKC], dan penanganan warga yg sedang isoman," kata Darsana.

Menurut Lurah Prawirodirjan, Rusdi Haryanto, Kelurahan Prawirodirjan mengajukan rencana anggaran sebesar Rp75 juta. Namun anggaran itu belum cair.

Dana ini untuk edukasi Covid-19 sebanyak Rp10,6 juta, kegiatan pengawasan PPKM sebanyak Rp2,9 juta, dan pengadaan alat pelindung diri (APD) serta perlengkapan penyemprotan untuk tiga kampung sebesar Rp12,3 juta.

"Adapula untuk bantuan sembako bagi warga difabel, yatim, ibu hamil, pengemudi becak motor, dan warga terdampak sejumlah 100 paket sebesar Rp20 juta. Selain itu ada peralatan isolasi mandiri senilai Rp19,7 juta dan perlengkapan serta penguatan tim kubur cepat sebanyak Rp9,3 juta," kata Rusdi.

Lurah Sosromenduran, Agus Joko Mulyono, proposal sudah dikirim pada 20 Agustus 2021. Sementara untuk akhir pengiriman proposal pada 24 Agustus 2021.

Kelurahan Sosromenduran mengajukan rancangan BTT sebesar Rp75 juta.

Lurah Sumbermulyo, Bantul, Ani Widayani mengatakan, telah mendapatkan pencairan dana senilai Rp55 juta dari BKK Danais beberapa waktu lalu. Jaga warga di tempat tersebut telah terbentuk. "Saat ini kami gunakan untuk penanganan Covid-19," katanya.

Dana Bervariasi

Sementara itu, di Sleman dari 86 kalurahan, baru 45 kalurahan yang mencairkan BKK Danais.

Lurah Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, Heri Suprpto mengaku pengajuan dan pencairan dana BKK dari Danais untuk penanggulangan Covid-19 sangat mudah. "Kami cukup mengajukan RKA [rencana kerja dan anggaran], sudah cair," katanya.

Meskipun sudah mencairkan dana tersebut, pemerintah kalurahan belum menggunakannya. Meskipun BKK tersebut untuk penanganan Covid-19, katanya, tetapi belakangan penggunaan BKK Danais tersebut dibolehkan untuk kegiatan vaksinasi. "Nah, cuma belum ada pedoman penggunaan BKK ini untuk vaksinasi. Padahal yang kami butuhkan saat ini dan paling urgen adalah vaksinasi," ujar Heri.

Ia masih menunggu terbitnya pedoman penggunaan BKK Danais untuk vaksinasi. Kegiatan vaksinasi penting karena kebutuhan mengenai APD dan penanganan

Covid-19 lainnya di kalurahan tersebut sudah terpenuhi. "Tinggal vaksinasi. Kami akan bekerjasama dengan para pelaku usaha jasa dan pariwisata di Kepuharjo serta TNI/Polri untuk vaksinnya. Ini penting agar roda perekonomian warga di lereng Merapi bisa segera bangkit," ujarnya.

Di Bantul, sebanyak 28 dari 75 kalurahan telah mencairkan anggaran BKK Danais. Plt Asisten Pemerintahan Setda Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan kalurahan tersebut mendapatkan pencairan dana bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp75 juta. "Data ini masih sementara, karena masih ada *update* dari Pemda DIY," kata Hermawan.

Kepala Bidang Ideologi dan Ketahanan Nasional, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul, Irma Madyastuti Rahayu mengatakan, 144 kalurahan di Gunungkidul sudah mengajukan BKK Danais. "Mayoritas sudah mencairkan karena tinggal 22 kalurahan yang mengurus pencairan karena harus memperbaiki proposal yang diajukan," katanya.

Meski demikian, adanya kalurahan yang belum bisa mencairkan bukan menjadi masalah. Ia menyakini segera memperoleh pencairan BKK Danais. "Tinggal menunggu giliran saja dan saya yakin pasti cair," katanya.

Berdasarkan catatan dari Satpol-PP Kabupaten Kulonprogo, masih 12 kalurahan yang belum menerima dana BKK Danais.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol-PP Kabupaten Kulonprogo, Alif Romdhoni, mengatakan kecepatan pemerintah kalurahan dalam merespons syarat dalam penerimaan BKK Danais menjadi faktor penentu proses pencarian dana tersebut.

"Ada beberapa kalurahan yang mispersepsi dengan syarat pencairan dana BKK Danais. Syarat administrasi yang dibutuhkan justru tidak dicantumkan. Jadi, lebih ke kendala administratif. Memahami sebuah instruksi melalui media virtual itu kan memang beda ya dengan pertemuan secara langsung," ujar Alif.

Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Daerah Indonesia (Apdesi) Bantul, Mahardi Badrun yang juga Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, mengatakan sisa kalurahan yang belum mendapatkan pencairan anggaran BKK Danais termasuk kalurahan yang dipimpinnya saat ini. "Memang kemarin ada yang harus dibenahi, salah satunya rencana anggaran dan belanja dan berita acara. Diminta revisi. Namun koordinasi terakhir, semua akan cair bulan ini dan bulan depan," jelasnya. (Hafit Yudi Suprobo, David Kurniawan, & Sirojul Khafid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Cokrodingratan			
3. BPKAD			
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005